



Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LKjLP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjlp Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kuala Tungkal,

2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



DIANDA PUTRA, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19780626 199612 1 001



DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	2
	1.2 Tugas Pokok	4
	1.3 isu-isu Strategis	4
	1.4 Sumber Daya Manusia	5
	1.5 Sarana Prasarana	6
	1.6 Keuangan	7
	1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	8
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	10
	2.1 Perencanaan Strategis	10
	2.2 Perjanjian Kinerja	15
	2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	19
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	20
	3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	20
	3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	21
	3.3 Realisasi Anggaran	32
	3.4 Inovasi	38
	3.5 Prestasi dan Penghargaan	39
	3.6 Kolaborasi Lintas Sektor	39
BAB IV	: PENUTUP	43



BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) . Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1.1 Struktur Organisasi

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , dimana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tergolong didalam urusan Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beralih statusnya menjadi instansi vertikal.

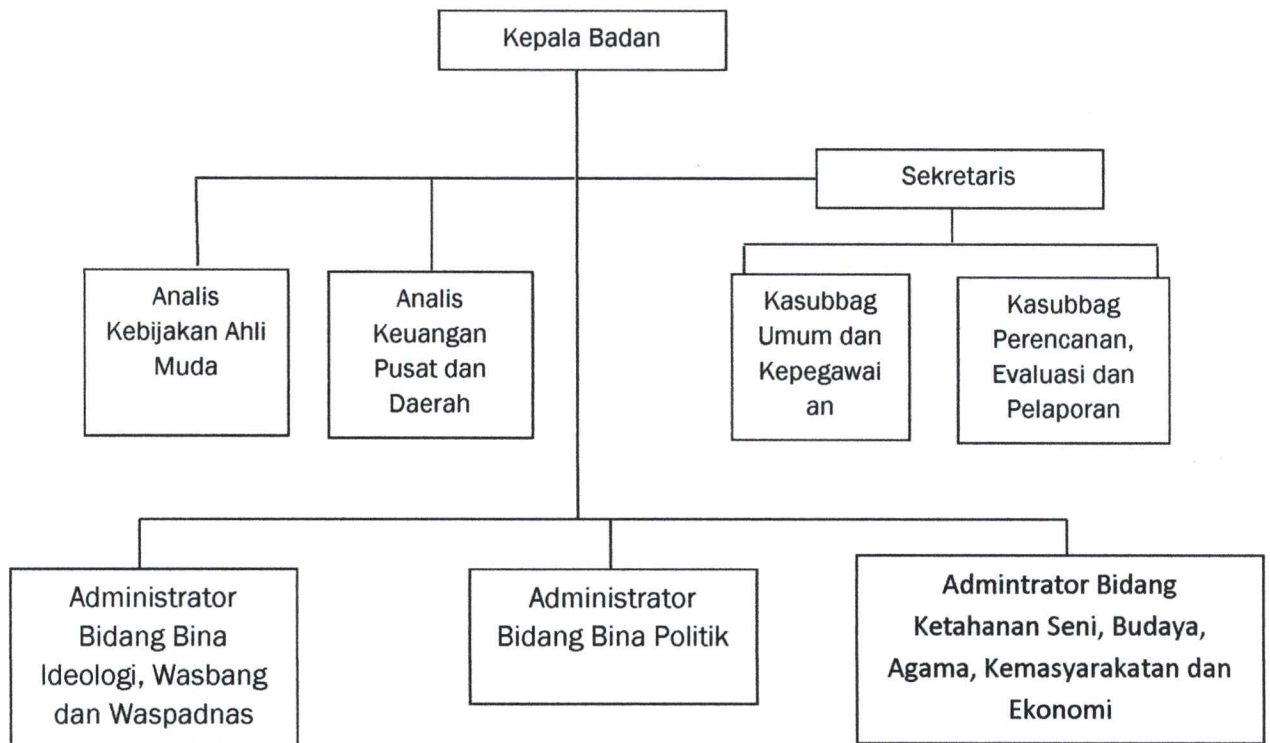
Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksana urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah Bupati Tanjung Jabung Barat , sampai dengan peraturan tersebut diundangkan . Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpayung pada dua Peraturan Daerah , dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 mempunyai tugas membantu Bupati Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang . Bidang Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Program Pelaporan. Bidang Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional terdiri dari Kelompok Subtansi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Kelompok Subtansi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Bidang Bina Politik terdiri dari Kelompok Substansi Bidang Impelementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik dan Kelompok Substansi Kelembagaan dan



Fasilitasi Pemilu. Bidang Ketahanan Seni, Budaya , Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari Kelompok Substansi Ketahanan Seni dan Budaya dan Kelompok Substansi Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi





1.2 Struktur Organisasi

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik . Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan , ketahanan bangsa dan politik dalam negeri lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- e) Pelaksanaan kesekretariatan Badan ;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

1.3 Isu – Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaah visi – misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 5(lima) tahun ke depan yaitu :

1. Kondusifitas wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusifitas wilayah ;



2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa ;
3. Demokrasi : pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

1.4 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan bulan Desember 2024 berdasarkan pangkat, jabatan dan golongan sebanyak 42 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 21 (tiga puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) , 1 (satu) orang PPPK dan 20 (delapan belas) orang tenaga kerja kontrak .

Tabel 4.1
Pegawai Badan Kesbang dan Politik
Menurut Struktur

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1 orang
Sekretaris	1 Orang
1. Sub Bagian Program	1 Orang
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1 Orang
3. Sub Bagian Umum Kepegawaian	1 Orang
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wasbang	1 Orang
1. Analis Kebijakan Ahli Muda	1 orang
2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-
Kepala Bidang Bina Politik	1 Orang
1. Analis Kebijakan Ahli Muda	1 Orang
2. Sub bidang kelembagaan dan fasilitasi Pemilu	-
Kepala Bidang Ketahanan Seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	1 Orang
1. Sub bidang ketahanan seni dan budaya	-
2. Sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi	-
Staf Pelaksana ASN, PPPK dan TTK	42 orang



1.5 Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset, yang terdiri dari :

Sarana Perlengkapan Kantor
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Tanjab Barat

No	Nama Perlengkapan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	3 unit
2	Kendaraan Roda 2	16 unit
3	Meja 1 Biro	1 buah
4	Meja ½ Biro	1 buah
5	Kursi Kerja ½ Biro	41 buah
6	Kursi Putar	1 buah
7	Kursi Putar Sandaran Pendek	2 buah
8	Kursi Stainless Polos	4 buah
9	Kursi Lipat	20 buah
10	Kursi Tamu Letter L	8 buah
11	Kursi Standar	1 buah
12	Kursi Plastik	15 buah
13	Kursi Kayu	1 buah
14	Meja Komputer ¼ Biro	2 buah
15	Meja Panjang	1 buah
16	Lemari 2 pintu	1 buah
17	Lemari Arsip	2 buah
18	Meja Komputer	1 buah
19	Gorden Jendela	1 set
20	Dispenser	1 buah
21	Gambar Presiden / Warpres	1 set
22	Gambar Bupati / Wabup	1 set
23	Lambang Negara	1 buah
24	Bendera	1 buah
25	Genset	2 unit
26	Tangga Alumunium	1 unit
27	AC	4 buah
28	Kipas Angin Gantung	7 buah
29	Papan Data Besar	2 buah
30	Jam dinding	2 buah



No	Nama Perlengkapan	Jumlah
29	Filing Kabinet	5 buah
30	Brankas	2 buah
31	Lemari Arsip	2 buah
32	Lemari Arsip 2 pintu	2 unit
33	Komputer / PC Unit	1 unit
34	Laptop	2 buah
35	Infocus	1 buah
36	Printer	7 buah

Untuk sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih belum terlalu ideal untuk ukuran kantor yang seharusnya. Salah satunya kondisi bangunan kantor yang tidak memadai sehingga tidak adanya ruang pendukung seperti ruang perpustakaan, ruang resepsionis dan kursi tunggu untuk tamu, serta ruang laktasi. Hal ini masih cukup jauh dari ruang kantor yang representatif.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8.151.878.679,- dengan rincian belanja operasi Rp 7.992.997.679,- dan belanja modal Rp 158.881.000, yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.



Tabel 1.6
Daftar Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Operasi	Rp. 7.992.997.679
2.	Belanja Modal	Rp. 158.881.000
	Total	Rp. 8.151.881.000

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang alasan disusunnya/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, isu strategis, kondisi pegawai dan sarana prasarana, serta Sistematika penulisan LAKIP.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi, prestasi serta inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB V LAMPIRAN

Memuat struktur organisasi, matriks Renstra, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, dan matriks tindak lanjut SAKIP 2024.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan manifestasi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016- 2021).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.



2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam cascade RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:.

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak	Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan
		Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
		Meningkatnya kualitas anak, Perempuan, Pemuda, dan Keluarga
Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
		Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
		Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya perekonomian kabupaten	Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan
		Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup



Visi	Misi	Sasaran Daerah
Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	Terpenuhinya kebutuhan Infrastruktur dasar bagi masyarakat
		Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Sumber : RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian Sasaran Daerah: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu juga mendukung pencapaian Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Meningkatnya kualitas pelayanan public serta Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun anggaran adalah:

Tabel 2.2
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan PD	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET TAHUNAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pentingnya kesatuan bangsa dan demokrasi	Persen	80%	83%	85%	87%	90%	93%



Sasaran Strategis Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET TAHUNAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama maupun golongan	Persentase konflik yang ditangani baik yang berlatar belakang ras, agama, sosial maupun ekonomi	Persen	80%	83%	85%	87%	90%	93%
	Persentase penurunan aksi unjuk rasa	Persen	80%	83%	85%	87%	90%	93%
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persentase masyarakat paham terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	Persen	80%	83%	85%	87%	90%	93%
Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Persen	80%	83%	85%	87%	90%	93%
Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Persentase suksesnya pelaksanaan pemilu	Persen	80%	83%	85%	87%	90%	93%
	Persentase peningkatan jumlah partisipasi politik masyarakat	Persen	80%	83%	85%	87%	90%	93%



2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 2.4

**Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama maupun golongan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (APBD Murni)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama maupun golongan	Persentase konflik yang ditangani baik yang berlatar belakang ras, agama, sosial maupun ekonomi	87%
	Persentase penurunan aksi unjuk rasa	87%
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persentase masyarakat paham terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	87%
Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	87%
Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Persentase suksesnya pelaksanaan pemilu	87%
	Persentase peningkatan jumlah partisipasi politik masyarakat	87%

No	Program RPJMD 2021 - 2026	Penyandingan Program Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020	Anggaran 2024 Rp	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	4.623.695.286	APBD 2024
2	Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.494.760.183	APBD 2024
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.197.112.400	APBD 2024
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13.983.000	APBD 2024



No	Program RPJMD 2021 - 2026	Penyandingan Program Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020	Anggaran 2024	Ket
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	310.707.000	APBD 2024
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	268.941.000	APBD 2024
Jumlah Anggaran			7.909.198.869	

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan dan penambahan anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama maupun golongan	Persentase konflik yang ditangani baik yang berlatar belakang ras, agama, sosial maupun ekonomi	87%
	Persentase penurunan aksi unjuk rasa	87%
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persentase masyarakat paham terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	87%
Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	87%
Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Persentase suksesnya pelaksanaan pemilu	87%
	Persentase peningkatan jumlah partisipasi politik masyarakat	87%



No	Program RPJMD 2021 - 2026	Penyandingan Program Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020	Anggaran 2024 Rp	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	4.739.375.096	APBD 2024
2	Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.732.999.383	APBD 2024
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.235.739.340	APBD 2024
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13.983.000	APBD 2024
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	302.707.000	APBD 2024
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	253.941.000	APBD 2024
	Jumlah Anggaran		8.151.878.679	



2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.909.198.869,- dengan rincian belanja operasi Rp 7.909.198.869,- sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 8.247.418.819,- dengan rincian belanja operasi Rp 8.081.613.819,- dan belanja modal Rp 165.805.000,- Target belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 termuat dalam Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7

**Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024**

Uraian	Target Rp.	Persentase
Belanja Operasi	8.081.613.819	92.51%
Belanja Modal	165.805.000	99.79%
Jumlah	8.247.418.819	100%



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama maupun golongan	Persentase konflik yang ditangani baik yang berlatar belakang ras, agama, sosial maupun ekonomi	Persen	87	87	100%
	Persentase penurunan aksi unjuk rasa	Persen	87	87	100%
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persentase masyarakat paham terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	Persen	87	87	100%
Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan	Persen	87	87	100%
Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	Persentase suksesnya pelaksanaan pemilu	Persen	87	87	100%
	Persentase peningkatan jumlah partisipasi politik masyarakat	Persen	87	87	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja seperti yang terlihat dalam tabel di atas. Pada tahun 2024, indikator kinerja untuk sasaran ini telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 87% .Dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barata yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:



3.2.1 Sasaran “ Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat “

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik turut serta membantu ketercapaian sasaran Daerah yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat , yang dalam hal ini berperan dalam aspek pencegahan . Tolak ukur capaian ini adalah penanganan kasus konflik sosial yang terjadi di masyarakat sebanyak 6 (Enam) Kasus . Konflik yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban . Aspek stabilitas keamanan inilah yang menjadi sasaran Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung, melalui upaya-upaya pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan antara lain dengan pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

3.2.2 Sasaran “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat membantu ketercapaian sasaran daerah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah . Sasaran ini wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam upaya mewujudkan Good Governance sebagai bentuk dari pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi.

Terlaksananya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Terdapat 5 (lima) program eksternal dan 1 (satu) program internal yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Berikut tabel Program, Indikator Program, Target, dan Realisasi serta Capaian Kinerja Program pada tahun 2024.